

## JAWABAN TUGAS 1

Rhiza S. Sadjad  
NIM 045276176

Fakultas : FHISIP/Fakultas Hukum, Ilmu Sosial dan Ilmu Politik  
Kode>Nama MK : **ISIP4213.38/Sistem Politik Indonesia 38**  
Tugas : 1

### Pertanyaan 1/3:

*Jelaskan cara kerja analisis sistem dari David Easton dengan menggunakan studi kasus penghapusan subsidi BBM!*

### Jawaban 1/3:

Analisis sistem politik dari **David Easton [1917 – 2014]**, seorang ilmuwan dalam bidang Ilmu Politik dari Amerika Serikat kelahiran Kanada, dibahas dalam referensi [1], **Modul 01, Kegiatan Belajar 1**, hal. **1.5 – 1.13**. Dari diagram **Gambar 1.1** pada hal. **1.6**, referensi [1], mengenai alur kerja suatu sistem politik, dapat dipahami bahwa sistem politik yang di-teori-kan oleh **Easton** ini diturunkan dari sistem teknik kendali (*control engineering*) yang disebut sistem kendali dengan umpan-balik (*feedback control systems*). Dalam sistem kendali dengan umpan-balik, masukan (*input*) biasanya merupakan acuan (*reference*), yang dibandingkan dengan umpan-balik (*feedback*) yang berasal dari keluaran (*output*), yang umumnya merepresentasikan kenyataan. Jadi perbandingan antara masukan acuan dengan umpan-balik pada dasarnya adalah selisih antara harapan dan kenyataan, yang disebut galat (*error*). Galat inilah yang di-proses oleh sistem sehingga diperoleh keluaran baru yang lebih baik, yang setelah di-umpan-balik-kan dan dibandingkan kembali dengan masukan acuan, (diharapkan) akan menghasilkan galat yang lebih kecil dari sebelumnya, atau diperoleh kenyataan yang semakin mendekati harapan. Sistem politik yang baik, berdasarkan analisis sistem dari **Easton**, adalah sistem politik yang bekerja secara berkelanjutan sehingga kenyataan dalam sistem politik tersebut dan lingkungannya semakin hari akan semakin mendekati harapan yang diinginkan oleh masyarakat.

Dari referensi [2] diketahui bahwa analisis sistem politik dari **Easton** disebut juga sebagai teori sistem (*system theory*) atau model masukan-keluaran (*input-output model*). Sistem politik dipandang secara teoretis dalam model masukan-keluaran ini sebagai sistem yang kompleks dan dinamis, berupa struktur interaktif yang mengolah masukan dari lingkungan sistem dan menghasilkan keluaran yang kembali mempengaruhi lingkungan sistem tersebut. Secara garis besar, komponen-komponen sistem menurut **Easton** dapat di-definisi-kan sebagai berikut:

- **MASUKAN** (*input*) merupakan berbagai kebutuhan, dukungan dan pengaruh dari lingkungan sistem yang berdampak pada sistem politik, termasuk di antaranya berbagai faktor sosial, ekonomi, budaya dan teknologi.

- **PROSES** (*throughput*) internal di dalam sistem yang men-transformasi masukan – atau jika terdapat umpan-balik, selisih antara masukan acuan dengan umpan-balik, antara harapan dan kenyataan - menjadi keluaran, termasuk di antaranya proses pengambilan keputusan, penyusunan kebijakan dan implementasi-nya.
- **KELUARAN** (*output*) sistem politik adalah berbagai kebijakan, keputusan dan tindakan yang dihasilkan dari transformasi masukan (atau selisih antara acuan dan umpan-balik pada sistem dengan umpan balik) melalui proses, yang akan mempengaruhi lingkungan sistem serta akan menghasilkan perubahan umpan-balik dalam sistem dengan umpan-balik atau biasa disebut sistem daur tertutup (*closed-loop systems*).
- **UMPAN-BALIK** (*feedback*), yang merupakan tanggapan lingkungan sistem terhadap keluaran yang dihasilkan, bisa berupa tanggapan positif yang memperkuat atau mendukung kebijakan yang dihasilkan, atau tanggapan negatif yang menuntut penyesuaian kebijakan tersebut.

**Easton** secara teoretis menekankan pentingnya daur umpan-balik (*feedback loop*) untuk menjaga kestabilan sistem politik agar senantiasa mengarah ke semakin mendekatnya harapan dan kenyataan, serta kemampuan adaptasi terhadap perubahan-perubahan di lingkungan lokal, nasional, regional mau pun global. Analisis sistem politik dari **Easton** sangat membantu untuk memahami bagaimana suatu sistem politik berfungsi, menyesuaikan diri dengan perubahan dan menjaga keseimbangan dalam menghadapi berbagai tekanan, baik internal mau pun eksternal.

Selanjutnya analisis sistem politik dari **Easton** dapat diterapkan untuk menganalisis kasus penghapusan subsidi BBM. Pertama-tama perlu dipahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan “subsidi BBM” dan mengapa perlu (atau diharapkan dapat) dihapuskan. Berdasarkan referensi [2] subsidi BBM adalah sejumlah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) - tentunya dari Anggaran Belanja - untuk membuat harga jual BBM ke masyarakat (tertentu, yang kurang mampu) lebih rendah daripada harga yang sesungguhnya, sehingga daya beli dan konsumsi BBM masyarakat kelas menengah ke bawah akan meningkat. Harapannya dengan meningkatnya daya beli dan konsumsi masyarakat, aktivitas ekonomi akan meningkat pula, dan pada gilirannya akan mempercepat pertumbuhan ekonomi. Tapi di sisi lain, subsidi BBM ini akan membebani APBN, sehingga menghambat pembiayaan proyek-proyek pembangunan. Keadaan ideal yang diharapkan adalah harga jual BBM ke masyarakat sama dengan harga jual sebenarnya, tanpa subsidi, tapi tetap terjangkau oleh daya beli masyarakat.

Harga jual BBM dari BUMN PT. Pertamina ditetapkan secara politis, oleh pemerintah dengan persetujuan DPR RI. Jadi dalam model **Easton**, ketetapan harga BBM merupakan **keluaran** (*output*). Misalnya harga 1 liter BBM jenis Pertalite ditetapkan Rp. 10.000,- walau pun sebenarnya – jika dihitung secara ekonomis – harganya Rp. 15.000,- yang merupakan perjumlahan dari harga

beli + ongkos kirim + cukai (jika BBM tersebut di-impor), atau biaya produksi + transportasi (jika BBM tersebut diproduksi di dalam negeri), ditambah lagi dengan biaya operasional dan keuntungan perusahaan, karena perusahaan tetap harus menghasilkan keuntungan walau pun sedikit. Jadi katakanlah ada selisih Rp. 5.000,- setiap liter yang di-subsidi oleh pemerintah melalui APBN. Misalnya, untuk menghapus subsidi BBM jenis Pertalite, pemerintah menetapkan kenaikan harga BBM jenis Pertalite dari semula Rp. 10.000,- menjadi Rp. 15.000,-, sehingga beban APBN untuk men-subsidi BBM jenis Pertalite menjadi Rp. 0,-. Tapi tentu saja kenaikan harga BBM ini akan menimbulkan gejolak di masyarakat, yang menolak kenaikan harga BBM dengan berbagai aksi protes. Gejolak di masyarakat ini dalam model **Easton** disebut **umpan-balik** (*feedback*). Karena sifatnya menolak, maka umpan-balik ini disebut umpan-balik negatif. Jika umpan-balik ini dibiarkan membesar, maka justru akan ber-dampak negatif pula pada perekonomian, bahkan bisa menjadi krisis politik, seperti yang terjadi tahun 1998.

Untuk mencegah hal-hal yang semakin memburuk, maka berbagai faktor, misalnya harga minyak dunia, kondisi sosial-ekonomi, tingkat inflasi, dan lain-lain, menjadi **masukan** (*input*) untuk **proses** (*throughput*) selanjutnya. Sumber-sumber keuangan non-APBN, seperti Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), penerbitan surat-surat berharga, pinjaman luar-negeri, dan sebagainya, dapat dijadikan kompensasi dari kenaikan harga BBM jenis Pertalite tanpa subsidi yang berasal dari APBN. Keuntungan dari kenaikan harga BBM non-subsidi, bisa juga di-subsidi-silangkan untuk BBM jenis Pertalite. Dengan menghitung semua secara lebih cermat, maka bisa dihasilkan ketetapan untuk menurunkan kembali harga BBM jenis Pertalite, tidak kembali menjadi Rp. 10.000,- tapi menjadi Rp. 12.500,- misalnya, tanpa membebani APBN karena selisih harga Rp. 2.500,- dapat di-kompensasi dari sumber-sumber keuangan negara non-APBN. Ketetapan harga baru Rp. 12.500,- ini menjadi **keluaran** (*output*) yang baru dalam model masukan-keluaran dari **Easton**. Tentu akan mengundang reaksi dari masyarakat, bisa positif atau negatif, yang akan dijadikan **umpan-balik** (*feedback*) kembali. Demikian daur berulang secara berkelanjutan, sampai nantinya akan diperoleh ketetapan harga BBM jenis Pertalite non-subsidi, dengan harga yang diterima oleh masyarakat.

### Pertanyaan 2/3:

*Jelaskan bagaimana sosialisasi politik dan pembentukan budaya politik dilakukan pada masyarakat dengan teknologi digital saat ini!*

### Jawaban 2/3:

Dalam referensi [1], topik sosialisasi politik dan budaya politik di Indonesia dibahas dalam **Modul 02, Kegiatan Belajar 1 dan 2**, hal **2.5 – 2.17**. Dari materi yang disajikan dalam referensi [1] tersebut belum ada pembahasan yang mendalam terkait dengan sosialisasi politik dan pembentukan

budaya politik di era digital saat ini. Sebagaimana diketahui, dengan perkembangan teknologi digital pada masa kini, sosialisasi politik dan pembentukan budaya politik banyak dilakukan menggunakan berbagai *platform* media sosial, seperti *Instagram*, *Facebook*, *Twitter* dan *Tik-Tok*, serta media *chatting* seperti *WhatsApp* dan *Telegram*. Menurut referensi [2], sudah banyak pakar Ilmu Politik yang meneliti dan mendalami bagaimana dampak perkembangan teknologi digital terhadap sosialisasi politik dan pembentukan budaya politik, antara lain misanya:

1. **Henry Jenkins**, profesor ilmu komunikasi dan jurnalistik dari *University of Southern California* di Amerika Serikat, menulis berbagai artikel ilmiah tentang peranan media digital dalam membentuk budaya politik dan partisipasi dalam aktivitas politik khususnya di kalangan generasi muda, serta bagaimana komunitas daring (*on-line*) di dunia maya mempengaruhi sikap dan perilaku politik.
2. **Diana Owen**, profesor ilmu politik dari *Georgetown University* di Amerika Serikat, telah meneliti tentang keterkaitan antara media digital dengan partisipasi politik, khususnya tentang bagaimana *platform* digital membangun sosialisasi politik dan mempengaruhi keterlibatan dalam aktivitas politik di kalangan generasi muda.
3. **Ethan Zuckerman**, Direktur *Center for Civic Media at MIT* di Amerika Serikat, menulis berbagai artikel ilmiah tentang implikasi teknologi digital terhadap demokrasi dan masyarakat madani (*civic society*), yang membahas tentang bagaimana *platform* digital mengembangkan wacana politik, mempengaruhi opini publik dan budaya politik.
4. **Danah Boyd**, peneliti utama pada *Microsoft Research* dan pendiri lembaga penelitian *Data & Society* di Amerika Serikat, telah mempelajari secara mendalam keterkaitan antara teknologi, masyarakat dan budaya, serta menulis berbagai artikel tentang dampak media sosial terhadap pembentukan identitas dari kalangan generasi muda, komunitas daring (*on-line*) dan keterlibatan dalam kegiatan politik.
5. **Zizi Papacharissi**, profesor ilmu komunikasi dari *University of Illinois at Chicago* di Amerika Serikat banyak meneliti tentang dampak media sosial terhadap komunikasi politik dan keterlibatan dalam politik, serta bagaimana media sosial mem-fasilitasi sosialisasi politik dan pembentukan komunitas politik berbasis daring (*on-line*).

Sayang tidak berhasil dilacak pakar-pakar lain di luar Amerika Serikat – termasuk di Indonesia - yang meneliti bagaimana dampak perkembangan teknologi digital terhadap sosialisasi politik dan pembentukan budaya politik di era digital ini. Tetapi menurut referensi [2], secara umum para pakar dan akademisi mengakui telah terjadi transformasi dari sosialisasi politik dan pembentukan budaya politik sebagai dampak dari perkembangan teknologi digital, terutama terkait

dengan semakin terbukanya kesempatan dan semakin banyaknya tantangan yang harus dihadapi dalam dunia politik, untuk partisipasi demokratis dan kewarganegaraan.

Lebih jauh, menurut referensi [2], dampak perkembangan teknologi digital terhadap sosialisasi politik dan pembentukan budaya politik di era digital ini dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain, misalnya:

- *Pengaruh Media Sosial*. Media sosial memberikan ruang untuk partisipasi dalam diskusi politik, mobilisasi massa dan aktivisme politik, sehingga besar peranannya dalam sosialisasi politik, membuka kesempatan bagi publik untuk terlibat dalam dialog politik, serta bergabung dalam jaringan komunitas daring (*on-line*) dari berbagai aliran politik dan organisasi.
- *Pendidikan Politik*. Di era digital, kesempatan untuk mendapatkan pendidikan politik secara gratis melalui berbagai *platform* digital semakin terbuka luas. Hal ini akan meningkatkan literasi politik warganegara dengan lebih cepat dan lebih luas.
- *Dis-informasi dan Mis-informasi*. Dampak negatif dari perkembangan teknologi digital adalah maraknya penyebaran berita bohong dan ujaran kebencian, yang menodai perkembangan demokrasi, karena distorsi informasi dan persepsi politik, yang ujungnya akan menimbulkan sinisme terhadap demokrasi itu sendiri.
- *Efek Echo Chambers dan Filter Bubbles*. Dampak negatif lainnya dari perkembangan teknologi digital untuk sosialisasi politik dan pembentukan budaya politik adalah yang disebut efek *Echo Chambers* dan *Filter Bubbles*, yaitu ketika sekelompok orang atau komunitas politik hanya mendapatkan informasi sepihak yang mendukung atau menguatkan keyakinan politiknya saja, dan tidak pernah mendengar atau mengetahui bagaimana informasi dari pihak yang berlawanan. Misalnya dalam PILPRES 2019 yang lalu, “*kampret*” hanya berkumpul dengan dan mendengarkan dari sesamanya “*kampret*”, demikian pula “*cebong*”, hanya percaya pada sesamanya “*cebong*”.
- *Akses Informasi*. Dengan teknologi digital, dunia politik menjadi semakin transparan, karena semakin terbuka luasnya akses terhadap sumber-sumber informasi. Semakin sulit membuat *lobby-lobby* dan *deal-deal* ruang tertutup di antara para *elite* atau sekelompok aktivis. Gagasan-gagasan politik, perpektif dan wacana baru dalam bidang poilitik menjadi mudah di-akses oleh publik, dan lebih mudah tersebar luas, tapi dampak negatifnya, segala rumor, aib, gossip dan berita buruk pun sama mudahnya untuk tersebar luas.

Jadi, di era digital, sosialisasi politik dan pembentukan budaya politik, sama-sama mendapat dampak negatif mau pun positif dari perkembangan teknologi digital, khususnya dengan

berkembangnya penggunaan berbagai *platform* media sosial, seperti *Instagram*, *Facebook*, *Twitter* dan *Tik-Tok*, serta media *chatting* seperti *WhatsApp* dan *Telegram*.

Pertanyaan 3/3:

*Jelaskan kondisi ekonomi Indonesia saat ini di periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo! Kaitkan jawaban anda dengan kebijakan politik yang dikeluarkan oleh pemerintah!*

Jawaban 3/3:

Terkait dengan ekonomi politik dan dinamikanya di Indonesia dari masa ke masa, dibahas dalam referensi [1], **Modul 02**, *Kegiatan Belajar 3 dan 4*, hal. **2.19 – 2.34**. Tapi hanya sedikit sekali diulas tentang bagaimana kondisi ekonomi di Indonesia di era pemerintahan Presiden Joko Widodo, yaitu di hal. **2.33 – 2.34**, pada paragraf terakhir, yang mengatakan bahwa pada awal periode pertama Presiden Joko Widodo, ekonomi global sempat diterpa krisis finansial, sehingga pertumbuhan ekonomi mengalami perlambatan, kemudian *rebound* kembali sampai mencapai 5 % pada tahun 2016. Karena kurangnya bahan dari referensi [1], maka untuk menjawab pertanyaan di atas, akan lebih banyak merujuk ke referensi [2].

Menurut referensi [2], upaya yang dilakukan oleh pemerintahan Presiden Joko Widodo umumnya berfokus pada pembangunan infra-struktur, promosi penanaman modal dan penguatan dalam bidang kesejahteraan sosial. Pada periode kedua, khususnya dari tahun kedua sampai keempat [2020 – 2022], terjadi pandemi COVID-19 yang praktis menghentikan segala kegiatan ekonomi dan pembangunan hampir di semua sektor. Olehnya itu, sebenarnya Presiden Joko Widodo memerlukan periode ketiga dari pemerintahannya agar target-target yang direncanakan dapat tercapai, dan visi “*Indonesia Emas 2045*” pun bisa terwujud. Tapi perpanjangan ke periode ketiga tidak dimungkinkan oleh ketentuan dalam konstitusi. Dengan demikian dilakukanlah upaya-upaya politis lainnya, sehingga walau pun Presiden Joko Widodo tidak lagi menjabat secara “resmi” pada periode ke-presiden-an 2024 – 2029, penggantinya diharapkan akan meneruskan semua *legacy* dari Presiden Joko Widodo. Maka dimenangkanlah Prabowo Subianto – yang menjabat sebagai menteri dalam kabinet Presiden Joko Widodo - dengan wakilnya Gibran Raka Bumingraka – yaitu putera Presiden Joko Widodo – dengan berbagai cara, dimulai dengan mengubah syarat usia bagi Capres/Cawapres melalui keputusan sidang Mahkamah Konstitusi (MK) yang dipimpin oleh adik-ipar Presiden, sehingga Gibran Raka Bumingraka dapat diajukan sebagai Cawapres dari Capres Prabowo Subianto. Keputusan MK ini bernuansa pelanggaran etika dan menuai kontroversi, karena ada konflik kepentingan dari Ketua-nya, yang *notabene* adalah paman dari Gibran Raka Bumingraka.

Terlepas dari kontroversi “periode ketiga” (terselubung) dari era pemerintahan Presiden Jokowi, ada beberapa hal yang merupakan kata-kunci dari kondisi ekonomi Indonesia pada periode

kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, khususnya setelah *rebound* dari kondidi vakum selama dua tahun pandemi COVID-19, yaitu:

1. **Kebijakan Fiskal:** Pemerintah Presiden Joko Widodo menerapkan kebijakan fiskal yang ketat untuk menjaga keberlanjutan fiskal yang mendukung pertumbuhan dan pembangunan, termasuk meningkatkan pendapatan negara, me-rasionalisasi per-belanja-an dan mengunrangi defisit anggaran.
2. **Program Kesejahteraan Sosial:** Pemerintah Presiden Joko Widodo meng-implementasikan berbagai program kesejahteraan sosial dalam rangka mengentaskan kemiskinan dan mempersempit kesenjangan kaya-miskin, termasuk BANSOS (yang juga menuang kontroversi karena dikaitkan dengan pemenangan Paslon No. 02 Prabowo-Gibran), reformasi bidang kesehatan dan berbagai upaya untuk meningkatkan akses pendidikan bagi kalangan bawah dan daerah-daerah tertinggal.
3. **Iklim Investasi:** Berbagai upaya (promosi) telah dilakukan untuk memperbaiki iklim investasi, khususnya untuk menarik investor asing dalam berbagai proyek strategis nasional, seperti proyek IKN, proyek kereta-api cepat, proyek jalan tol, proyek Pantai Indak Kapuk (PIK) dan lain sebagainya, termasuk upaya-upaya merampingkan birokrasi yang menghambat investasi, termasuk menyederhanakan prosedur, mempercepat proses, transparansi, harmonisasi regulasi dan perundangan, dan digitalisasi.
4. **Pertumbuhan Ekonomi:** Setelah terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi selama pandemi COVID-19 yang hingga 0 % bahkan sempat mengalami pertumbuhan negatif, maka setelah *rebound*, diharapkan pada akhir periode kedua pemerintahan Presiden Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi bisa stabil rata-rata pada tingkat 4 -5 %, walau pun sebenarnya diperlukan lebih dari 6 % jika visi “*Indonesia Emas 2045*” ingin diwujudkan. Masalah lain dari pertumbuhan ekonomi adalah variasi (antar wilayah dan antar sektor) dan fluktuasi yang kadang cukup tajam dari kuartal ke kuartal pada satu tahun anggaran yang sama.
5. **Pembangunan Infrastruktur:** Pemerintahan Presiden Joko Widodo berupaya keras pada periode kedua-nya, khususnya pasca-pandemi COVID 19, untuk melakukan percepatan penyelesaian proyek-proyek pembangunan besar seperti proyek jalan tol, kereta api cepat, pelabuhan, bandara dan IKN. Diharapkan proyek-proyek besar ini akan meningkatkan konektivitas dan mengurangi biaya logistik, yang pada ujungnya diharapkan akan membantu mempercepat pertumbuhan ekonomi.
6. **Tantangan dan Peluang:** Pada akhir periode kedua pemerintahan Presiden Jokowi, berbagai tantangan masih harus terus dihadapi seperti misalnya kesenjangan pendapatan yang terlalu lebar antara pendapatan terendah dengan tertinggi, penumpukan hutang luar-

negeri, distribusi kekayaan yang timpang antara segelintir orang yang menguasai sebagian besar kekayaan dengan sebagian besar orang yang harus berbagi kekayaan yang sedikit, berkuasanya kaum oligarkhi, tidak meratanya pembangunan infra-struktur di berbagai wilayah (antara Jawa dan Luar-Jawa, antara Kawasan Timur dengan Kawasan Barat), serta berbagai tantangan perekonomian global yang masih berada dalam ketidak-pastian pasca-pandemi COVID-19 dan berbagai konflik seperti perang Ukraina vs Rusia dan perang Palestina vs Zionis-Israel. Tugas pemerintahan selanjutnya adalah bagaimana mengubah tantangan-tantangan ini menjadi peluang, dan menjaganya agar tidak menjadi ancaman bagi integritas nasional.

Kondisi per-ekonomi-an di atas, menurut referensi [2], sangat terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil pemerintah dalam bidang ekonomi, seperti antara lain: (1) Kebijakan Fiskal, (2) Kebijakan Moneter, (3) Regulasi, (4) Kebijakan Tata Niaga, (5) Kebijakan terkait Pekerja, khususnya penetapan upah minimum, (6) Kebijakan Investasi, khususnya dalam pembangunan infra-struktur, (7) Kestabilan Politik dan Pemerintahan, (8) Kebijakan terkait peningkatan Kesejahteraan Sosial, yang kesemuanya itu secara umum akan mempengaruhi iklim perekonomian, berdampak pada dunia usaha, tingkat konsumsi dan daya beli masyarakat, iklim investasi dan arah kebijakan ekonomi secara keseluruhan.

## REFERENSI

- [1] **Ikhsan Darmawan, et.al.**, “*Sistem Politik Indonesia*”, Modul 1 – 9, ISIP4213, Edisi 3 [Mei 2023], Penerbit Universitas Terbuka, Jakarta
- [2] **ChatGPT**, Aplikasi *Chatting* berbasis AI, dalam Sistem Operasi Android.